Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Sultanah Safiatuddin dan Legitimasi Kepemimpinan Perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1675

Aditya Octavian Hamidi
UIN Sunan Ampel Surabaya
adityaoctavian75@gmail.com
Rochimah
UIN Sunan Ampel Surabaya
rochimah@uinsa.ac.id

Abstrak: penelitian ini membahas legitimasi kepemimpinan perempuan pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin Syah di kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1675. Kajian ini dilatar belakangi oleh perdebatan mengenai kedudukan perempuan dalam struktur politik Islam, khususnya ketika Sultanah Safiatuddin berhasil menduduki takhta dan memimpin Aceh selama lebih dari tiga dekade. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung legitimasi kekuasaan Sultanah Safiatuddin serta pengaruh kepemimpinannyaterhadap stabilitas politik dan perkembangan Aceh. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian berasal dari kronik lokal, naskah sejarah Aceh, serta literatur akademik yang membahas pemerintahan Sultanah Safiatuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan Sultanah Safiatuddin dibangun melalui dukungan elit istana, otoritas keagamaaan ulama, serta tradisi politik Aceh yang memberikan ruang bagi perempuan untuk menduduki jabatan tertinggi kerajaan. Dibawah kepemimpinannya, Aceh mampu mempertahankan stabilitas politik pasca wafatnya Sultan Iskandar Tsani, mengembangkan pendidikan Islam, sertamemperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai wilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam konteks Aceh abad ke-17 memperoleh legitimasi yang kuat baik secara politik maupun keagamaan.

Kata Kunci: *Aceh Darussalam, kepemimpinan perempuan, legitimasi politik, Sultanah Safiatuddin, sejarah Islam.*

PENDAHULUAN

Kerajaan Aceh Darussalam bertahan sangat lama dalam lintasan sejarah. Kerajaan Islam paling berpengaruh di Asia Tenggara ini berdiri pada tahun 1496 M dan berakhir pada tahun 1906 M. Dalam rentang tahun 400 tahun lebih itu kerajaan Aceh Darussalam sempat dipimpin oleh empat orang sultanah (ratu) secara berturut-turut. Mereka adalah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin (1675-

1678), Sultanah Inayat Zakiatuddin (1678-1788), dan Sultanah Kamalat Syah (1688-1699).

Dari keempat Sultanah tersebut, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin adalah pemimpin perempuan yang paling mendominasi dalam kemajuan kerajaan Aceh Darussalam dalam semua aspek (Maysarah, 2024). Hal ini disebabkan Safiatuddin melanjutkan pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (1636-1641) yang merupakan suksesor dari Sultan Agung Iskandar Muda (1607-1636) yang berhasil membawa Aceh ke puncak (zenith) kemajuan peradaban Islam di Asia Tenggara. Sebagaimana diketahui dari 35 raja/ratu yag pernah memerintah Kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda adalah sosok yang berhasil membawa kerajaan ke masa kegemilangan.

Tampilnya pemimpin perempuan di Aceh terlihat sejak Sultan Alaiddin Riayat Syah Al-Mukamal (1589-1604) mengangkat Keumalahayati sebagai laksamana (admiral) armada laut Aceh (Sa'adah, 2007). Kemudian dibentuk Resimen Wanita Pengawal Istana, dan pada masa Sultan Iskandar Muda dibentuk Divisi Keumala Cahaya, yang beranggotakan hanya wanita. Peranan wanita di Aceh telah berlangsung lama, maka pengangkatan empat Sultanah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, dikarenakan Sultanah merupakan pucuk pimpinan negara, maka tidak heran jika menjelang penobatan Safiatuddin muncul kontroversi tentang hukum wanita sebagai kepala negara menurut Islam.

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam penting di kawasan Asia Tenggara yang mengalami perkembangan politik, ekonomi, keagamaan, dan intelektual yang cukup signifikan sejak abad ke-16 hingga abad ke-17. Pada abad ke-17, Aceh tidak hanya dikenal sebagai kekuatan politik di kawasan Selat Malaka, tetapi juga sebagai salah satu pusat perkembangan Islam dan ilmu pngetahuan di dunia Melayu. Posisi tersebut semakin terlihat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang berhasil membawa Aceh mencapai masa kejayaan. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat kepemimpinan Aceh dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Tsani yang merupakan menantu dari Sultan Iskandar Muda hingga wafat pada 1641. Wafatnya Sultan Iskandar Tsani menghadirkan persoalan penting mengenai keberlanjutan kekuasaan Kesultanan Aceh, terutama karena penerus yang kemudian naik tahta adalah seorang perempuan, yaitu Sultanah Safiatuddin Syah (Khan, 2013: 204-225).

Persoalan legitimasi menjadi penting karena kekuasaan seoran penguasa tidak hanya ditentukan oleh proses pengangkatan secara formal, tetap juga oleh penerimaan

kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh dalam struktur kerajaan. Dalam kasus Sultanah Safiatuddin, keberlangsungan pemerintahannya menunjukkan bahwa terdapat proses penerimaan dan pembentukkan legitimasi yang memungkingkan dirinya mempertahankan kedudukan sebagai penguasa dalam waktu yang panjang.

Salah satu aspek penting dalam legitimasi Sultanah Safiatuddin adalah dukungan dari elite kerajaan. Pergantian kekuasaan di Aceh tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelompok elite yang memiliki pengaruh dalam proses politik kerajaan. Penelitian mengenai sultanah-sultanah Aceh menunjukkan bahwa persetujuan mayoritas orang kaya atau elite kerajaan mempunyai arti penting dalam proses pengangkatan penguasa perempuan. Setelah memperoleh kedudukan tersbut, kemampuan Sultanah Safiatuddin dalam menjaga hubungan dengan elite kerajaan menjadi salah sat faktor yang membantu mempertahankan pemerintahannya (Khan, 2017: 57-92). Dengan demikian, legitimasi politik Sultanah Safiatuddin tidak hanya berasal dari kedudukannya sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi juga terbentuk melalui hubungan politik dan kemampuan membangun dukungan dari kelompok-kelompok yang memiliki penga,nruh dalam pemerintahan Aceh.

Selain elite istana, ulama memiliki posisi penting dalam kehidupan politik dan keagamaan Kesultanan Aceh. Hubungan antara penguasa dan ulama menjadi salah satu unsur utama yang menentukan penerimaan terhadap suatu pemerintahan. Dalam konteks Sultanah Safiatuddin, keberadaan ulama seperti Nuruddin Ar-Raniri dan Abdurrauf Al-Singkili mejadi bagian penting dalam perkembangan kehidupan keagamaan dan intelektual Aceh. Penelitian mengenai hubungan Abdurrauf al-Singkili dengan pemerintahan Sultanah Safiatuddin menunjukan adanya keterlibatan ilama dalam memberikan dukungan terhadap kepemimpinan perempuan di Aceh. Hal ini mmperlihatkan bahwa legitimasi Sultanah Safiatuddin juga mempunyai dimensi keagamaan, karena penerimaan terhadap kepemimpinannya berlangsung dalam lingkungan kerajaan yang menjadikan Islam sebagai salah satu dasar penting dalam kehidupan politik.

Legitimasi tersebut kemudian dapat dilihat melali keberlangsungan pemerintahan Sultanah Safiatuddin selama lebih dari tiga dekade. Masa pemerintahan yang panjang menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan di Aceh tidak berhenti pada proses pengangkatan, tetapi juga mencakup kemampuan mempertahankan kekuasaan. Penelitian terbaru mengenai keberlangsungan kepemimpinan Sultanah Safiatuddin

menunjukkan bahwa reputasi kebijaksanaan, dukungan pejabat istana, serta pengaruh ulama menjadi beberapa faktor yang membantu mempertahankan posisinya sebagai penguasa. Bahkan, penggunaan gelar kerajaan, mata uang, dan cap kerajaan menunjukkan bahwa Sultanah Safiatuddin memiliki kedudukan kedaulatan sebagaimana penguasa sebelumnya (Ghoniyah, 2024). Dengan demikian keberlangsungan pemerintahannya dapat menjadi salah satu indikator bahwa legitimasi kepemimpinan perempuan di Aceh memiliki dasar politik sosial yang cukup kuat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas Sultanah Safiatuddin dari berbagai sudut pandang. Sher Banu A. L. Khan misalnya, mengkaji kepemimpinan Sultanah Safiatuddin dalam konteks kepemimpinan perempuan di dunia Melayu-Muslim dan menekankan pentingnya konsep kesalehan serta penguasa yang adil dalam membangun legitimasi. Penelitian yang lain mengenai kepemimpinan Sultanah Safiatuddin membahas sistem pemerintahan, kebijakan politik, pendidikan, maupun kontribusinya terhadap perkembangan kesultanan Aceh. Sementara itu, penelitian mengenai kebijakan Sultanah Safiatuddin juga memberikan perhatian terhadap kedudukan perempuan dan perkembangan intelektual pada masa pemerintahannya (Ramadhani & Wijiyanto, 2022: 32–40).

Penelitian ini menggunakan teori legitimasi dan otoritas Max Weber sebagai landasan untuk menganalisi proses terbentuknya legitimasi kepemimpinan Sultanah Safiatuddin di Kesultaan Aceh Darussalam. Weber menjelaskan bahwa suatu bentuk kekuasaan dapat bertahan apabila terdapat kepercayaan terhadap legitimasi dari pihak yang menjalankan kekuasaan tersebut. Dengan demikian, legitimasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seorang penguasa dalam memegang kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan alasan yang membuat masyarakat atau kelompok yang berada di bawah kekuasaan menerima dan mematuhi otoritas tersebut. Weber membagi dasar legitimasi ke dalam tiga tipe ideal, yaitu otoritas legal-rasional, otoritas tradisional, dan otoritas karismatik. Otoritas legal-rasional didasarkan pada keyakinan terhadap aturan yang berlaku, otoritas tradisional didasarkan pada kepercayaan terhadap tradisi dan kebiasaan yang telah berlangsung lama, sedangkan otoritas karismatik didasarkan pada kepercayaan terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana lgitimasi kepempinan Sultanah Safiatuddin terbentuk dalam Kesultanan Aceh Darussalam serta bagaimana legitimasi tersebut berhubungan dengan keberlangsungan

pemerintahannya. Fokus penelitian diarahkan pada tiga unsur utama, yaitu dukungan elite istana, otoritas ulama, dan tradisi politik Aceh yang memberikan kontribusi terhadap kepemimpinan perempuan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap historiografi Islam Nusantara, khususnya dalam memhami pengalaman kepemimpinan perempuan dalam Kesultanan Aceh Darussalam serta menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam sejarah politik Islam tidak selalu dibentuk oleh gender penguasa, tetapi jga oleh kemampuan membangun penerimaan politik, keagamaan, dan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengkaji legitimasi kepemimpinan Sultanah Safiatuddin di Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1641–1675. Metode sejarah digunakan karena penelitian ini berfokus pada peristiwa dan dinamika politik masa lampau yang membutuhkan penelusuran terhadap sumber-sumber sejarah. Dalam penelitian sejarah terdapat beberapa tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2005: 69–82). Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan Sultanah Safiatuddin dan Kesultanan Aceh Darussalam, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan antara lain *Bustan al-Salatin* karya Nuruddin ar-Raniri, surat-surat Sultanah Safiatuddin dengan pihak Batavia/VOC, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik dan sosial Kesultanan Aceh. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu yang membahas Sultanah Safiatuddin, kepemimpinan perempuan, serta sejarah Kesultanan Aceh Darussalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sultanah Safiyatuddin Shah adalah anak pertama sultan Iskandar Muda dengan permaisurinya yang bernaam Putri Sani yang bergelar Puteri Ratna Indra, yaitu puteri Maharaja Lela Bang Mansur yang lebih dikenal dengan Teungku Chik Direubee. Tidak jelas tentang ibu dari Safiyyatuddin Shah ini. menurut Zainuddin, ibu dari Safiyyatuddin adalah Putri Sani sedangkan dalam *Hikayat Maleem Dagang* menyebut bahwa permaisuri pertama Sultan Iskandar Muda ini bernama Putri Ratna Sendi Istana. Hanya yang telah jelas dan pasti bahwa Syafiyyatuddin Shah adalah anak dari Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda sendiri, dari pihak leluhur ibu adalah keturunan raja dari kerajaan Darul Kamal dan dari pihak leluhur ayah adalah keturunan kelaurga raja dari kerajaan Mahkota Alam.

Usai wafatnya Sultan Iskandar Tsani sebagai Sultan Kerajaan Aceh Darussalam, maka pembesar negara dan ulama bermusyawarah menentukan penggantinya. Melalui persetujuan Kadli Malikul Adil dan Balai Gading, hal ini dirumuskan dan menetapkan Putri Safiatuddin sebagai Raja. Ia memiliki gelar Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan berdaulat yang memerintah dari tahun 1641-1675. ia menjadi perempuan pertama memimpin Kerajaan Aceh Darussalam (Rahmat, 2022).

Proses pengangkatan Safiatuddin menunjukkan bahwa pergantian kekuasaan di Aceh tidak hanya berkaitan dengan garis keturunan, tetapi juga membutuhkan penerimaan dari kelompok-kelompok yang mempunyai pengaruh dalam pemerintahan. Penelitian mengenai strategi kepemimpinan Safiatuddin menunjukkan adanya pro dan kontra terhadap pengangkatannya. Sebagian kelompok elite dan ulama mempertanyakan kepemimpinan perempuan, sedangkan kelompok lain menerima Safiatuddin sebagai penerus pemerintahan Aceh (Lestari, 2021).

Sultanah Safiatuddin Tajul Alam Syh menjadi tokoh penting dalam sejarah politik Islam di Nusantara arena dia merupakan perempuan pertama yang menduduki tahkta Kesultanan Aceh Darussalam dan memerintah dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu 1641-1675. Pemerintahannya berlangsung kurang lebih 34 tahun dan menjadi awal dari periode pemerintahan empat orang Sultanah di Aceh. Keberadaan seorang perempuan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sbuah Kesultanan Islam merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, terlebih Aceh pada masa tersebut merupakan kerajaan yang memiliki struktur politik dan kehidupan keagamaan Islam yang kuat. Dengan demikian, naiknya Sultanah Safiatuddin bukan hanya persoalan bagaimana seorang perempuan memperoleh dan mempertahankan legitimasi kekuasaaan dalam lingkungan politik dan keagamaan Aceh (Hermaliza, 2009).

Keberadaan Safiauddin sebagai penguasa perempuan juga perlu dilihat dalam konteks tradisi politik Aceh yang sebelumnya telah memberikan ruang cukup besar kepada perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Dedeh Mursyi menunjukkan bahwa perempuan Aceh tidak hanya berperan dalam kehidupan domestik, tetapi jga terlibat dalam bidang politik dan bahkan menduduki posisi kepemimpinan tertinggi. Pemerintahan empat sultanah selama 59 tahun menjadi salah satu bukti bahwa perempuan memliki ruang politik yang cukup kuat dalam masyarakat Aceh (Mursyi, 2017: 60–77).

Dengan demikian, kedudukan Safiatuddin menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak selalu ditentukan oleh karakteristik pribadi pnguasa, tetapi juga oleh struktur sosial

dan politik yang memungkinkan seseorang memperoleh dan mempertahankan otoritas. Safiatuddin menjadi contoh bahwa seorang perempuan dapat memperoleh legitimasi politik ketika terdapat kondisi sosial-politik yang memungkinkan kepemimpinannya diterima.

Keberadaan Sultan Iskandar Tsani dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam dapat ditelusuri melalui sumber primer berupa kitab Bustan al-Salatin karya Nuruddin ar-Raniri. Dalam kitab tersebut, khususnya pada bab XII yang membahas sejarah raja-raja di Aceh Darussalam, dijelaskan bahwa Sultan Iskandar Tsani merupakan penerus Sultan Iskandar Muda. Nuruddin ar-Raniri menceritakan bahwa setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Sultan Iskandar Tsani kemudian menduduki takhta Kesultanan Aceh Darussalam dengan gelar Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah. Uraian tersebut juga menggambarkan karakter kepemimpinannya yang dikaitkan dengan sifat adil, keberanian, dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. (Ar-Raniri, 1900, hlm. 125–126)

1. **Mekanisme Pengangkatan dan Penerimaan terhadap Kepemimpinan Perempuan**

   Persoalan penting dalam memahami legitimasi Safiatuddin adalah proses pengangkatnnya sebagai sultanah. Pengangkatan tersebut berlangsung seetelah wafatnya Sultan Iskandar Tsani. Kondisi tersebut mnyebabkan kerajaan harus menentukan sosok yang dapat meneruskan pemerintahan. Safiatuddin memiliki kedudukan yang kuat karena merupakan bagian dari kerajaan dan memiliki hubungan langsung dengan dinasti Iskandar Muda melalui garis keturunan serta perkawinan dengan Iskandar Tsani.

   Namun, kedudukan genealogis saja belum cukup menjelaskan keberhasilannya menduduki takhta. Dalam struktur politik kerajaan, penguasa juga membutuhkan pengakuan dari kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh. Hal ini terlihat dari kajian mengenai pemerintahan perempuan di Aceh yang menunjukkan bahwa naiknya sultanah berkaitan dengan situasi politik tertntu, termasuk persoalan suksesi dan tidak adanya calon laki-laki yang dianggap mampu menggantikan penguasa sebelumnya (Sa'adah, 2007: 206–218).

   Dalam hal ini, pengangkatan Safiatuddin dapat dipahami sebagai proses kompromi politik. Kerajaan membutuhkan kesinambungan pemerintahan, sedangkan kelompok elite harus menerima figur yang dapat menjaga

keberlangsungan kesultanan. Safiatuddin kemudian menjadi pilihan yang mampu menghubungkan kepentingan dinasti dengan kebutuhan akan stabilitas politik.

Marlinda Irwanti juga menunjukkan bahwa pengangkatan Safiatuddin berkaitan dengan adanya kelompok yang mendukung dan kelompok yang memperdebatkan kepemimpinan perempuan. Dukungan terhadap Safiatuddin tidak hanya datang dari lingkungan kerajaan, tetapi juga dari sejumlah ulama, anggota keluarga kerajaan, dan masyarakat. Dengan demikian, proses pengangkatannya memperlihatkan adanya komunikasi politik antara calon penguasa dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keberlaangsungan pemerintahan (Irwanti, 2016: 65–73).

Dalam perspektif Weber, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan otoritas tradisional. Tradisi politik memberikan kerangka yang memungkinkan penguasa menjalakan kekuasaan, sedangkan keberlangsungan kekuasaan menunjukkan bahwa masyarakat politik menerima struktur tersebut sebagai sesuatu yang sah. Safiatuddin tidak perlu membangun sistm pemerintahan baru dari awal, tetapi menjalankan kekuasaan melalui lembaga dan tradisi yang telah berkembang sebelumnya.

2. Peran Elite Kerajaan dalam Mempertahankan Legitimasi Sultanah

setelah berhasil menduduki takhta, tantangan Safiatuddin tidak berhenti pada proses pengangkatan. Ia harus mengahadapi lingkungan politik yang diisi oleh berbagai kelompok laki-laki. Struktur tersebut menjadikan kemampuan mengelola hubungan politik sebagai faktor penting dalam mempertahankan kedudukannya.

Mursyi memperlihatkan bahwa perempan Aceh secara historis memiliki pengalaman dalam bidang politik dan pemerintahan. Hal tersebut memberikan konteks sosial yang memungkinkan seorang perempuan tidak sepenuhnnya dianggap asing dalam ruang politik Aceh (Mursyi, 2017: 60–77).

Dalam praktiknya, legitimasi Safiatuddin kemudian diperkuat melalui kemampuannya mempertahankan stabilitas kerajaan. Keberadaan lembaga pemerintahan dan pembagian fungsi diantara pejabat kerajaan menunjukkan bahwa pemerintahan tidak sepenuhnya bergantung kepada tindakan personal sultanah. Hasanuddn Yusuf Adan menjelaskan bahwa pemerintahan Aceh memiliki struktur berjenjang mulai dari tingkat pusat, nanggroe, mukim, hingga

gampong. Sturktur tersebut menunjukkan adanya sistm pemerintahan yang kompleks dalam Kesultanan Aceh darussalam (Adan, 2013: 121–128).

Struktur pemerintahan tersebut menjadi penting bagi analisis legitimasi Safiatuddin. Ia tidak memerintah dalam ruang kosong, tetapi berada dalam sistem politik yang telah mempunyai aturan dan lembaga. Oleh sebab itu, keberhasilannya mempertahankan pemerintahan dapat dilihat sebagai kemampuan menyesuaikan kepemimpinannya dengan struktur politik yang telah ada.

Sultanah Safiatuddin sebagai Sultanah memperlihatkan bahwa egitimasi kepemimpinan perempuan di Aceh terbentuk melalui proses politik. Safiatuddin tidak hanya memperoleh kedudukan karena merupakan dari keluarga kerajaan, tetapi juga karena terdapat kelompok-kelompok menerima keberadaannya sebagai penguasa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan seorang penguasa dalam sistem politik Aceh membutuhkan hubungan dengan elite kerajaan.

3. Kedudukan Ulama sebagai Penguat Legitimasi Keagamaan

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kerajaan yang menempatkan Islam sebagai bagian penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, hubungan antara penguasa dengan ulama menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari pmbetukan legitimasi. Dalam konteks pemerintahan Safiatuddin, hubungan tersebut menjadi semakin penting karena kepemimpinan perempuan menjadi persoalan yang berkaitan pemikiran keagamaan.

Hasanuddin Yusuf Adan menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Aceh, Al-Qur'an, hadist, jima', dan qiyas menjadi sumber penting dalam sistem hukum kerajaan. Ia juga menunjukkan bahwa sumber-sumber sejarah seperti *Taj al-Salatin, Bustan al-Salatin,* dan *Adat Aceh* menjadi bagian penting untuk memahami hubungan antara Islam dan sistem pemerintahan Aceh (Adan, 2013: 65–120).

Kedudukan ulama dalam sistem tersebut membuat hubungan antara Safiatuddin dan ulama memilki kedudukan penting adalah Abdurrauf al-Singkili. Sumber mengenai sejarah pendidikan Aceh mencatat bahwa Abdurrauf kemudian menduduki posisi Qadi Malikul Adil dalam pemerintahan Safiauddin. Posisi

tersebut menunjukkan adanya hubungan antara otoritas keagamaan dan struktur pemerintahan kerajaan (Haba, 2004: 20–21).

Hubungan tersebut semakin terlihat melalui karya *Mir'at al-Tullab*. Karya Abdurrauf tersebut berkaitan dengan hukum Islam dan digunakan untuk memberikan pedoman dalam persoalan hukum. Sumber sejarah mengenai pendidikan Aceh menyebukan bahwa karya tersebut ditulis atas permintaan Safiatuddin dan selesai sekitar tahun 1663. Hal ini menujukkan bahwa penguasa tidak memisahkan pemeritahan dari pengembangan ilmu agama, tetapi justru melibatkan ulama dalam pembentukan pengetahuan hukum yang dibutuhkan kerajaan.

Hubungan antara penguasa dan ulama tersebut dapat dipahami sebagai salah satu sumber penguatan legitimasi. Dalam perspektif Weber, legitimasi politik tidak harus muncul dari satu sumber saja. Otoritas politik dapat memperoleh penguatan dari nailai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat. Dalam konteks Aceh, nilai-nilai yang dipercaya oleh Masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, Sultanah Safiatuddin merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah politik dan peradaban Islam di Kesultanan Aceh Darussalam. Pengangkatannya sebagai sultanah pada tahun 1641 setelah wafatnya Sultan Iskandar Tsani menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang dalam struktur politik Kesultanan Aceh. Kepemimpinan Safiatuddin tidak hanya didasarkan pada kedudukannya dalam keluarga kerajaan, tetapi juga terbentuk melalui penerimaan dari elite kerajaan, ulama, serta struktur politik yang berkembang di Aceh.

Legitimasi kepemimpinan Safiatuddin berlangsung melalui proses yang berkelanjutan. Hubungan dengan elite kerajaan menjadi bagian penting dalam mempertahankan stabilitas pemerintahan, sedangkan hubungan dengan ulama memperkuat kedudukan keagamaan pemerintahannya. Perhatian terhadap pendidikan Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, keterlibatan perempuan, serta hubungan diplomatik dengan pihak luar juga menunjukkan bahwa Safiatuddin menjalankan fungsi pemerintahan secara aktif. Arsip surat-menyurat Aceh dengan Batavia turut memperlihatkan bahwa Safiatuddin diakui dan bertindak sebagai penguasa dalam hubungan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

Adan, Hasanuddin Yusuf. *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.

Ar-Raniri, Nuruddin. (1900). Bustan al-Salatin. Singapura: American Mission Press.

Ghoniyah, Sofi. 2024. *The Endurance of Female Leadership in Islamic Southeast Asia: A Study of Sultanah Safiatuddin* (R. 1641–1675). Jakarta: Universitas Islam Internasional Indonesia.

Hermaliza, Essi. 2009. *Safiatuddin: Apa dan Siapa?* Aceh: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Irwanti, Marlinda. "Women's Political Communications: Assessing Leadership in Queen Safiatuddin in Aceh Darussalam in the 17th Century." *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi* 1, no. 1 (2016): 65–73.

Khan, Sher Banu A. L. 2013. "Men of Prowess and Women of Piety: A Case Study of Aceh Dar al-Salam in the Seventeenth Century." *Journal of Southeast Asian Studies* 44 (2): 204–225.

Khan, Sher Banu A. L. 2017. *Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641–1699*. Singapore: NUS Press.

Lestari, Sri Rahayu Puji. *Strategi Sultanah Safiatuddin dalam Memimpin Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam 1641–1675 M*. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021.

Muarrief Rahmat, "Komunikasi Politik Sultanah Safiatuddin Aceh," Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam 5, no. 2 (2022): 2.

Maysarah, dan Hasan Basri M. Nur. "Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Dalam Memajukan Pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 26–41.

Mursyi, Dedeh. "Kepemimpinan Para Perempuan Muslim dari Kerajaan Aceh Darussalam (1641–1699)." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 5, no. 1 (2017): 60–77.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 2005.

Ramadhani, Desy, and Septian Teguh Wijiyanto. 2022. "Sulthanah Taj'al Alam Safiatuddin Syah: Nilai Inspirasi dan Kontribusi dalam Memimpin Kesultanan Aceh 1641–1675." *Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 3 (2): 32–40.

Sa'adah, Rd. Siti. "Ratu-Ratu Aceh Abad Ke-17: Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kekuasaan." Al-Turas 13, no. 2 (2007).